

## **BAB II**

### **FLUKTUASI NILAI EKSPOR CPO KE TIONGKOK 2019-2024**

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konteks empiris dan faktual dari perdagangan Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Tiongkok. Sebagai komoditas strategis, kelapa sawit memainkan peran vital dalam struktur ekspor nasional dan menyumbang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui pendapatan devisa maupun penyerapan tenaga kerja. Tiongkok, sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, memiliki posisi yang sangat penting dalam rantai pasok global komoditas ini, sehingga memahami dinamika ekspor CPO ke Tiongkok menjadi krusial dalam melihat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai struktur produksi dan distribusi industri sawit nasional, kemudian dilanjutkan dengan analisis tren ekspor CPO ke Tiongkok, kebijakan impor dan hambatan perdagangan dari pihak Tiongkok, serta strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Selain itu, bab ini juga mengulas posisi Indonesia dalam Global Value Chain (GVC) industri sawit, termasuk peran aktor-aktor seperti perusahaan multinasional, lembaga sertifikasi, serta tantangan dan peluang untuk melakukan *upgrading* posisi dalam rantai nilai global. Pembahasan ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi analisis lebih dalam yang akan dikembangkan pada Bab 3 melalui pendekatan teoritis, termasuk teori perdagangan internasional, diplomasi ekonomi, dan konsep GVC.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gereffi (2018), pemahaman atas struktur rantai nilai global sangat penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang

berupaya tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pemain strategis dalam produksi bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, bab ini tidak hanya menjelaskan data dan tren yang ada, tetapi juga menggambarkan bagaimana posisi dan strategi Indonesia terbentuk dalam sistem perdagangan internasional yang semakin kompleks dan terfragmentasi.

## **2.1. Industri CPO di Indonesia**

Industri kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa, penyerap tenaga kerja, maupun penggerak pembangunan daerah. Sejarah kelapa sawit di Indonesia bermula pada masa kolonial, ketika bibit sawit pertama kali diperkenalkan dari Afrika Barat ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Perkebunan sawit komersial berkembang pesat di Sumatra dan Kalimantan sejak awal abad ke-20, dan terus meluas hingga era pasca-Orde Baru melalui program kemitraan seperti PIR-BUN dan liberalisasi investasi asing (Purnomo, Shantiko, & Puspitaloka, 2021). Saat ini, Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), luas lahan perkebunan sawit Indonesia telah mencapai sekitar 16,38 juta hektar pada tahun 2022, dengan total produksi CPO sebesar 46,7 juta ton (GAPKI, 2023). Pertumbuhan industri ini ditopang oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan lahan, iklim tropis yang sesuai, serta dukungan kebijakan pemerintah, seperti insentif ekspor, hilirisasi industri, dan program biodiesel (Syahza et al., 2020).

Jumlah produksi minyak sawit di Indonesia sangat tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri namun volume produksi minyak sawit mengalami tren naik turun selama lima tahun belakangan. Menurut data dari GAPKI, selama tahun 2019 Indonesia memproduksi 47,18 juta ton CPO, kemudian pada tahun 2020 produksi CPO sebesar 47,03 juta ton. Pada tahun 2021 produksinya turun menjadi 46,89 juta ton. Tahun 2022 turun lagi menjadi 46,73 juta ton. Kemudian di tahun 2023 jumlah produksinya meningkat cukup banyak menjadi 50,07 juta ton dan pada tahun 2024, jumlah produksi CPO mencapai 48.16 juta ton (GAPKI, 2025).

**Tabel 2.1 Jumlah Produksi CPO Indonesia Tahun 2019-2024**

| Tahun | Jumlah Produksi CPO (dalam juta ton) |
|-------|--------------------------------------|
| 2019  | 47,18                                |
| 2020  | 47,03                                |
| 2021  | 46,89                                |
| 2022  | 46,73                                |
| 2023  | 50,07                                |
| 2024  | 48,16                                |

*Sumber: GAPKI 2025, dolah oleh penulis*

Kontribusi industri sawit terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Pada 2022, ekspor produk sawit menyumbang sekitar USD 39,28 miliar atau sekitar 14% dari total ekspor nonmigas Indonesia, menjadikan sektor ini sebagai sumber devisa terbesar nonmigas (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, industri sawit juga menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk 2,7 juta petani swadaya dan lebih dari 4 juta pekerja di sektor hulu dan hilir (Indonesian Palm Oil Association (GAPKI, 2023).

Indonesia merupakan negara yang bersahabat dengan ruang tumbuh CPO. Tingginya jumlah produksi CPO membuat Indonesia dapat melakukan kegiatan ekspor ke negara lain dan menjadikan Indonesia negara pengespor CPO terbesar di dunia, mengalahkan Malaysia yang sempat unggul di beberapa tahun sebelumnya. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Desember tahun 2022, produksi minyak sawit di seluruh dunia mencapai 77,22 juta ton dengan Indonesia menjadi negara produksi minyak sawit terbesar yaitu 45,5 juta ton (Sadya 2023). Dengan kata lain angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 59% dari keseluruhan produksi minyak sawit di seluruh dunia.

CPO di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam proses produksi yang memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan industri ini. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan teknis. Saat ini, produktivitas nasional di Indonesia hanya sekitar 3,4 ton/ hektar per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang mencapai 6 sampai 8 ton. Banyak Perkebunan, khususnya milik petani kecil yang belum menunjukkan produktivitas sesuai potensi optimal. Dalam penanganan masalah ini upaya intensifikasi seperti penggunaan bibit unggul dan praktik pemupukan tepat dapat meningkatkan hasil hingga 65%, namun implementasinya yang masih terbatas. Kemudian permasalahan teknis seperti pemupukan yang tidak seimbang serta minimnya peremajaan tanaman juga berkontribusi pada rendahnya produktivitas. Banyak kebun yang tidak menggunakan pupuk secara optimal, dan umur tanaman sawit yang tua tanpa replanting menyebabkan penurunan hasil kumulatif.

Permasalahan yang tak kalah penting adalah adanya ekspansi perkebunan ke lahan hutan dan gambut menyebabkan deforestasi masif dan degradasi ekosistem. Keberlanjutan lingkungan menjadi isu penting; penggunaan lahan gambut memicu emisi karbon tinggi, sementara sistem pertanian intensif merusak kualitas tanah dan air yang memicu polusi dan perubahan iklim. Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus menjadi masalah serius karena merusak hutan alami dan ekosistem penting. Sejak awal 2000-an, perkebunan sawit telah berkontribusi sekitar sepertiga dari total deforestasi di Indonesia—sekitar 3 juta hektar hutan tua. Meskipun terjadi penurunan deforestasi pada periode 2018–2020 ke sekitar 45.285 ha/tahun, tren ini memburuk pada 2022–2023, dimana lebih dari 30.000 ha hutan—terutama di lahan gambut—dibuka guna perkebunan baru (Benedict & Heilmayr, 2024).

Di area konservasi seperti *Leuser Ecosystem*, deforestasi terdokumentasi meningkat melalui peristiwa “death by a thousand cuts”, di mana pembukaan lahan kecil oleh banyak pelaku menyebabkan kerusakan ekosistem penting dan meningkatkan risiko terhadap satwa langka seperti orangutan, harimau, gajah, dan badak. Lahan gambut yang dikeringkan untuk sawit juga berpotensi besar memicu kebakaran hutan yang melepas karbon signifikan dan memperburuk perubahan iklim global. Deforestasi sawit mengakibatkan perluasan perkebunan ilegal, khususnya di kawasan terlindung dan lahan gambut. Misalnya, di Rawa Singkil Wildlife Reserve (Aceh) ditemukan sekitar 2.609 ha hutan yang dibuka sejak 2016, dan sekitar 645 ha di antaranya telah ditanam sawit. Selain itu, sekitar 10–16.000 ha

area hutan hilang di Pulau Laut (Kalimantan Selatan) dalam tiga tahun terakhir akibat aktivitas konversi lahan ilegal.

Deforestasi juga menurunkan keragaman flora dan fauna secara signifikan, dengan perkebunan sawit memiliki keragaman tumbuhan dan mamalia yang sangat rendah dibanding hutan alam. Meskipun ada kemajuan seperti program moratorium izin sawit baru sejak 2019, tren deforestasi masih tinggi, terutama di kawasan-kawasan korporat atau yang didorong investor besar. Untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri dan konservasi lingkungan, Indonesia perlu memperkuat regulasi, menerapkan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan penegakan hukum—terutama di area lindung dan gambut—untuk melindungi ekosistem kritis dan mencegah deforestasi lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama mitra internasional mendorong intensifikasi pertanian, peremajaan kebun, dan penerapan standar keberlanjutan seperti ISPO, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil tanpa menambah lahan baru serta melindungi ekosistem kritis.

Namun, permasalahan dalam industri kelapa sawit tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Di sisi lain, persoalan yang tak kalah penting dan mendesak untuk diperhatikan adalah kondisi sumber daya manusia di sektor ini. Kesejahteraan pekerja perkebunan sawit, yang menjadi tulang punggung utama produksi, masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari upah yang rendah, status kerja yang tidak pasti, hingga risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi. Produksi sawit di Indonesia memang menyumbang lapangan kerja bagi jutaan orang, namun kesejahteraan pekerja sering kali jauh dari ideal. Sebagian besar pekerja harian lepas atau kontrak tidak memiliki

jaminan seperti tunjangan hari raya atau jaminan sosial. Banyak pekerja, khususnya wanita yang dipaksa memenuhi target berat atau jumlah pohon, sering bekerja hingga 10 hingga 12 jam per hari. Upah yang diterima pun di bawah standar kebutuhan hidup keluarga, bahkan di bawah upah minimum daerah. Para pekerja sawit juga menghadapi resiko kesehatan yang serius akibat sering terekspos bahan kimia berbahaya seperti paraquat tanpa perlindungan yang cukup serta akibat kondisi kerja yang berat. Studi menunjukkan pekerja rentan terhadap gangguan otot dan tulang, penyakit infeksi, bahkan gangguan pernapasan akibat asap kebakaran hutan dan emisi dari pembukaan lahan gambut. Beberapa perusahaan sudah menunjukkan komitmennya menerapkan standar keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO dan mulai meningkatkan kondisi pekerja seperti menyediakan alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan rutin, dan dialog sosial.

Secara keseluruhan, industri CPO adalah sektor strategis yang memberikan andil besar dalam perekonomian Indonesia—mulai dari devisa, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan daerah—namun di sisi lain menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial yang membutuhkan manajemen yang lebih baik. Gambaran umum ini menjadi dasar untuk memahami peran Indonesia dalam global value chain komoditas sawit dan strategi diplomasi ekonomi yang akan dikaji pada bab-bab berikutnya. Dengan posisi Indonesia sebagai pemasok utama CPO dunia, industri ini menjadi kunci dalam perdagangan internasional dan hubungan ekonomi Indonesia dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok sebagai salah satu importir utama. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap struktur, tantangan, dan kontribusi industri sawit sangat penting dalam membaca posisi Indonesia dalam

rantai nilai global serta dalam merumuskan kebijakan yang tepat di tengah tekanan global terhadap komoditas ini.

## **2.2 Produksi dan Distribusi CPO**

Produksi dan distribusi CPO di Indonesia merupakan tulang punggung rantai nilai industri kelapa sawit, yang mencakup seluruh proses mulai dari budidaya, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS), hingga pengiriman produk akhir ke pasar domestik maupun ekspor. Produksi kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari tiga kategori pelaku utama, yaitu perusahaan besar swasta (PBS), perusahaan negara (BUMN), dan petani swadaya (smallholders). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), dari total luas lahan sawit sebesar 16,38 juta hektar pada tahun 2022, sekitar 54,7% dikelola oleh perusahaan swasta, 6,2% oleh BUMN, dan 39,1% oleh petani rakyat. Keterlibatan petani swadaya yang cukup besar menjadi karakteristik khas distribusi produksi sawit di Indonesia dan turut menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi kualitas, efisiensi produksi, dan sertifikasi keberlanjutan.

Proses produksi CPO dimulai dari pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit (PKS). Menurut GAPKI (2023), kapasitas pengolahan PKS di Indonesia terus meningkat, seiring dengan bertambahnya lahan dan produksi sawit. Rata-rata rendemen minyak sawit berkisar antara 19–23%, tergantung pada kualitas TBS dan efisiensi pabrik. Setelah diolah menjadi CPO, produk tersebut didistribusikan melalui dua jalur utama: pertama, untuk konsumsi dalam negeri (terutama sebagai bahan baku minyak goreng, biodiesel, dan industri makanan); kedua, untuk ekspor ke berbagai negara, dengan Tiongkok, India, Pakistan, dan negara-negara Uni

Eropa sebagai tujuan utama. Dalam distribusi domestik, *CPO* biasanya disalurkan ke kilang (*refinery*) untuk diproses lebih lanjut menjadi produk turunan seperti *refined bleached deodorized palm oil* (RBDPO), olein, stearin, atau bahkan biodiesel. Sementara untuk ekspor, pelabuhan-pelabuhan utama seperti Dumai, Belawan, dan Samarinda menjadi simpul logistik penting dalam pengapalan komoditas ini (Putri et al., 2021).

Distribusi *CPO* di Indonesia juga dipengaruhi oleh infrastruktur fisik dan kebijakan logistik nasional. Ketergantungan terhadap moda transportasi darat dan laut serta kondisi jalan dan pelabuhan sering kali menjadi faktor penghambat kelancaran distribusi, terutama dari daerah-daerah produksi di pedalaman Sumatra dan Kalimantan. Selain itu, peran perusahaan trading dan eksportir besar sangat dominan dalam mengelola jalur distribusi ekspor, terutama yang memiliki akses langsung ke pembeli luar negeri dan kontrak jangka panjang. Pemerintah Indonesia juga menerapkan pengawasan melalui mekanisme pungutan ekspor, bea keluar, serta kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin pasokan domestik, terutama saat terjadi krisis harga minyak goreng di pasar nasional (Syahza et al., 2020). Struktur distribusi yang kompleks ini menunjukkan bahwa *CPO* bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan produk strategis yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari energi, pangan, hingga industri berat. Kompleksitas ini juga memperlihatkan pentingnya efisiensi logistik dan manajemen rantai pasok sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam skema global value chain. Ke depannya, integrasi antara pelaku hulu, hilir, dan logistik akan menjadi kunci dalam

memperbaiki efisiensi dan keberlanjutan distribusi CPO Indonesia di tengah tuntutan pasar global yang semakin kompetitif dan berbasis pada standar lingkungan.

Seiring dengan kompleksitas struktur produksi, distribusi CPO di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait efisiensi logistik dan pengelolaan rantai pasok, yang berdampak langsung pada daya saing produk dalam pasar global. Studi menggunakan model *Supply Chain Operations Reference* (SCOR) terhadap pabrik kelapa sawit di Aceh menunjukkan bahwa meskipun tingkat *Perfect Order Fulfillment* relatif tinggi (98%), terdapat hambatan besar dalam *cycle time* pemenuhan pesanan, biaya distribusi mencapai 71% dari total biaya rantai, dan waktu dari transaksi hingga penerimaan (*cash-to-cash cycle*) rata-rata 242 hari—angka yang mencerminkan inefisiensi tinggi (Sarjono, Christofer, Nayoan, & Nugraha, 2022). Selain itu, *Logistics Performance Index* (LPI) Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi sedang, yang menunjukkan infrastruktur transportasi, kualitas pelabuhan, serta ketepatan waktu pengiriman masih perlu ditingkatkan agar eksportir, termasuk pelaku sawit, tidak terbebani biaya logistik tinggi (Santoso, Nurhidayat, Mahmud, & Arijuddin, 2021). Isu ini diperparah oleh geografis negara kepulauan, dimana wilayah-wilayah produksi utama seperti Sumatra dan Kalimantan memiliki akses terbatas, mengakibatkan ketergantungan besar pada moda transportasi darat dan laut yang tidak jarang mengalami gangguan cuaca, kemacetan, dan biaya tinggi (Nursyifa, Febrianti, Cahaya Chalia, & Sasmita, 2023). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi harga jual domestik dan ekspor CPO, tetapi juga menurunkan *margin* keuntungan eksportir dan memperlemah posisi

tawar Indonesia dalam *Global Value Chain*, karena *buyer* internasional semakin menuntut produk yang tepat waktu dan traceable. Reformasi infrastruktur, seperti pembangunan tol laut, peningkatan kapasitas pelabuhan (Dumai, Belawan, Samarinda), serta teknologi pelacakan rantai pasok (*traceability systems*), menjadi agenda strategis agar distribusi CPO lebih kompetitif, berkelanjutan, dan selaras dengan permintaan buyer global yang mengedepankan standar logistik dan keberlanjutan (Hadiguna & Tjahjono, 2017; WRI Indonesia, 2018).

### **2.3. Ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok**

Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Tiongkok merupakan bagian penting dari dinamika perdagangan internasional Indonesia sekaligus mencerminkan keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global (*Global Value Chain/GVC*) industri kelapa sawit. Tiongkok tidak hanya menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan ekspor CPO Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami posisi strategis Tiongkok sebagai importir utama CPO, menganalisis tren fluktuasi ekspor dari waktu ke waktu, serta membandingkan peran Tiongkok dengan negara-negara tujuan ekspor lainnya. Tiga aspek tersebut penting untuk memetakan tantangan dan peluang diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat daya saing CPO di pasar internasional yang semakin kompetitif dan terdorong oleh isu keberlanjutan serta geopolitik perdagangan (Gereffi, 2014; Pietrobelli & Rabellotti, 2011). Oleh karena itu, subbab ini akan dibagi ke dalam tiga bagian: pertama, mengenai posisi Tiongkok sebagai mitra dagang strategis Indonesia dalam ekspor CPO; kedua, membahas tren dan fluktuasi ekspor serta faktor-faktor penyebabnya; dan ketiga,

membandingkan posisi Tiongkok dengan negara tujuan ekspor lain untuk menilai ketergantungan dan potensi diversifikasi pasar ekspor.

### 2.3.1 Posisi Tiongkok sebagai Importir Utama

Tiongkok menempati posisi yang sangat strategis sebagai salah satu importir utama Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia. Sejak tahun 2019, Tiongkok secara konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor CPO, berada di peringkat kedua setelah India dalam hal volume dan nilai ekspor. Data dari GAPKI menunjukkan bahwa pada tahun 2019, volume ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mencapai 8,15 juta ton, menurun menjadi 6,17 juta ton pada 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kembali meningkat menjadi 6,65 juta ton pada 2021 dan mencapai 6,35 juta ton pada 2022 (Sucipto, 2024). Proyeksi ekspor untuk tahun 2023 menunjukkan volume sekitar 7 juta ton, dan diperkirakan naik menjadi 8 juta ton pada 2024 (GAPKI, 2023). Selain volume, nilai ekspor ke Tiongkok juga signifikan; pada semester pertama 2023 saja, nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 3,88 miliar (Jakarta Globe, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa Tiongkok bukan hanya sekadar pasar utama dari sisi jumlah, tetapi juga mitra dagang yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara.

Peran Tiongkok dalam rantai nilai global (Global Value Chain/GVC) CPO semakin diperkuat melalui skema perdagangan bebas seperti ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang memberikan akses pasar tanpa hambatan tarif bagi produk CPO Indonesia (Sucipto, 2024). Selain itu, Tiongkok juga mulai mengadopsi standar keberlanjutan melalui inisiatif seperti China Sustainable Palm Oil Alliance dan

regulasi green value chain, yang memberi peluang lebih besar bagi produk CPO Indonesia yang tersertifikasi RSPO atau ISPO (PwC Indonesia, 2022). Indonesia yang semakin memperluas sertifikasi produk sawitnya memiliki peluang besar untuk mempertahankan pasar ini dalam jangka panjang.

Lebih jauh, analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar Tiongkok dengan skor RCA mencapai 9,03, mengungguli negara-negara pesaing seperti Malaysia dan Thailand (Sucipto, 2024). Di samping itu, investasi langsung perusahaan Tiongkok seperti Julong Group dan ZTE Agribusiness di sektor hulu kelapa sawit Indonesia menjadi indikator penting meningkatnya integrasi vertikal China ke dalam pasokan CPO Indonesia (ThePeople'sMap, 2023). Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Tiongkok sebagai konsumen, tetapi juga sebagai aktor dalam rantai produksi sawit global, Tiongkok memiliki peran vital sebagai importir utama CPO Indonesia karena menyumbang volume besar, nilai ekonomi tinggi, dan mendukung integrasi Indonesia dalam GVC melalui kebijakan perdagangan, regulasi keberlanjutan, dan investasi langsung. Posisi ini menjadikan hubungan dagang Indonesia–Tiongkok dalam sektor CPO sebagai isu strategis yang perlu terus dipelihara melalui pendekatan diplomasi ekonomi aktif dan kolaborasi lintas sektor.

### 2.3.2 Tren Ekspor dan Fluktuasi Perdagangan CPO Indonesia

Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Tiongkok dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan akibat pengaruh berbagai faktor eksternal maupun domestik. Tahun 2019 mencatat volume ekspor sebesar 6 juta ton, namun pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan penurunan tajam menjadi

sekitar 4,4 juta ton karena gangguan rantai pasok, pelemahan permintaan industri makanan, serta pembatasan aktivitas manufaktur di Tiongkok (Sucipto, 2024). Tahun 2021 menjadi momentum pemulihan dengan kenaikan volume ekspor menjadi 4,7 juta ton seiring pulihnya aktivitas ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan sektor industri pangan, kosmetik, dan bioenergi. Momentum ini diperkuat oleh kenaikan harga CPO global yang mencapai rata-rata lebih dari USD 1.100 per metrik ton (CRIF Asia, 2025). Namun pada 2022, ekspor kembali menurun drastis ke angka 3,8 juta ton akibat kebijakan larangan sementara ekspor oleh pemerintah Indonesia dan pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO), yang meskipun ditujukan untuk mengamankan pasokan dalam negeri, menciptakan ketidakpastian besar di mata importir seperti Tiongkok (GAPKI, 2023). Tahun 2023 menandai fase pemulihan dengan volume ekspor kembali meningkat menjadi 4,82 juta ton, diiringi stabilisasi kebijakan ekspor dan menguatnya permintaan CPO sebagai bahan baku bioenergi di Tiongkok (Index Mundi, 2024). Meski demikian, pada awal 2024 ekspor kembali anjlok sebesar 24,1% dibanding tahun sebelumnya karena pelemahan harga global (USD 1.134/ton) dan meningkatnya persaingan dari minyak nabati seperti kedelai dan bunga matahari (Bisnis Indonesia, 2024).

## 2.2. Tabel Volume dan Nilai Ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok 2019-2024

| TAHUN | VOLUME EKSPOR (JUTA TON) | NILAI EKSPOR (MILIAR USD) | CATATAN UTAMA                                        |
|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 2019  | 6                        | -                         | Perang dagang Amerika-Tiongkok                       |
| 2020  | 4,4                      | 3,00                      | Pandemi Covid-19; permintaan industri makanan tinggi |
| 2021  | 4,7                      | 4,8                       | Harga CPO global naik; permintaan meningkat          |

|      |      |      |                                                          |
|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 2022 | 3,8  | 3,57 | Larangan ekspor sementara                                |
| 2023 | 4,82 | 3,61 | Pemulihan pasca-pandemi; permintaan bioenergi meningkat  |
| 2024 | 4,5  | 3,50 | Turunnya volume produksi disertai turunnya volume ekspor |

*Sumber: GAPKI, 2025*

Di luar faktor permintaan dan harga, dinamika ekspor CPO Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh variabel lain seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika rupiah terdepresiasi, nilai ekspor dalam dolar bisa tetap tinggi meskipun volume stagnan, tetapi fluktuasi ini dapat menyebabkan volatilitas dalam pendapatan dan perencanaan ekspor (Bank Indonesia, 2020). Selain itu, manuver Tiongkok dalam mengatur cadangan stok CPO nasional turut memengaruhi tren ekspor. Negara tersebut diketahui secara strategis mempercepat atau menahan impor CPO berdasarkan fluktuasi harga global dan stok domestik, yang bertujuan menjaga kestabilan pasokan dan menekan harga internasional (USDA, 2023). Dalam konteks global, sentimen negatif terhadap industri sawit—terutama isu deforestasi dan pelanggaran hak pekerja—telah menimbulkan tekanan terhadap permintaan global. Meskipun Tiongkok tidak mengadopsi larangan seperti Uni Eropa, negara ini mulai menerapkan kebijakan keberlanjutan melalui China Sustainable Palm Oil Alliance serta meningkatkan permintaan terhadap CPO bersertifikat (Efrita, 2021). Sejalan dengan itu, hambatan non-tarif juga semakin kompleks, terutama berupa kewajiban traceability, standarisasi produk, dan pengawasan impor berbasis digital yang diterapkan oleh otoritas bea cukai Tiongkok (ITC, 2022). Kompleksitas ini menegaskan bahwa fluktuasi ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan

harga, tetapi juga oleh kondisi struktural pasar, kebijakan domestik, serta tekanan global terhadap keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

### 2.3.3 Perbandingan Tiongkok dengan Negara Importir Lain

Selain Tiongkok, India dan Pakistan merupakan dua tujuan utama ekspor CPO Indonesia yang secara volume bahkan melebihi Tiongkok pada beberapa periode. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, ekspor CPO Indonesia ke India mencapai 4,27 juta ton senilai USD 4,5 miliar, menjadikan India sebagai pasar terbesar ekspor sawit Indonesia, diikuti oleh Pakistan dengan volume sekitar 2,996 juta ton atau senilai USD 2,17 miliar, sementara ekspor ke Tiongkok berada di angka 2,36 juta ton (BPS dalam Kontan, 2025). Tren ini konsisten sejak 2012, dimana India terus mendominasi impor CPO Indonesia (Puteri et al., 2023).

Permintaan India terhadap minyak nabati—khususnya sawit—dipicu oleh konsumsi domestik yang sangat tinggi, terutama di sektor makanan, kuliner, dan industri makanan ringan. Meski demikian, volume ekspor ke India mengalami fluktuasi. Misalnya, pada 2021 terjadi penurunan karena India memberlakukan pajak impor tinggi, namun kembali meningkat setelah tarif dikurangi pada Oktober 2024 sebesar 60% untuk menyambut musim perayaan (Puteri et al., 2023; Reuters, 2024). Studi juga memproyeksikan bahwa ekspor CPO ke India akan mengalami koreksi jangka panjang karena peningkatan produksi sawit lokal—diversifikasi dan pertumbuhan produksi India diperkirakan mencapai 1,2–1,5 juta ton per tahun pada 2030–31—meski saat ini masih bergantung pada impor Indonesia dan Malaysia (Reuters, 2024).

Sementara itu, Pakistan juga menjadi pasar penting. Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan meningkat karena permintaan domestik yang terus tumbuh—sekitar 4,5 juta ton minyak nabati diperlukan, namun produksinya hanya sekitar 0,75 juta ton, sehingga Pakistan mengimpor sekitar 3 juta ton, sebagian besar dari Indonesia (Liputan6, 2023). Pakistan menikmati preferensi tarif melalui Indonesian–Pakistan Preferential Trade Agreement, yang memberi margin preferensi hingga 15%, menjadikan harga CPO Indonesia lebih kompetitif dibanding Malaysia. Pada tahun 2023, ekspor ke Pakistan naik sekitar 68,5%YoY menjadi 0,741 juta ton dan menunjukkan pangsa pasar yang potensial.

Meskipun India dan Pakistan adalah pasar besar, karakteristik pasar mereka berbeda. India sering memainkan peran sebagai tempat "parking" stok CPO ketika harga global rendah—stok domestiknya pernah melonjak 40% per Oktober 2023—serta permintaan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan musim perayaan (Katadata, 2023). Sebaliknya, permintaan Pakistan terbilang lebih stabil, tetapi volume ekspor juga sensitif terhadap kebijakan lokal seperti larangan GMO dan perkembangan perang regional yang memicu ketidakpastian (Liputan6, 2023; Bisnis.com, 2025).

Secara komparatif, meskipun Tiongkok dan India memiliki volume ekspor yang lebih besar, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di Pakistan melalui perjanjian tarif preferensi dan posisi tawar yang lebih kuat. Kondisi ini memperlihatkan dua strategi utama: diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko ketergantungan dan pengembangan diplomasi ekonomi yang berfokus pada penyusunan perjanjian perdagangan serta responsif terhadap gejolak politik, seperti

konflik India–Pakistan atau kebijakan tarif India, guna menjaga akses ke pasar-pasar penting dalam Global Value Chain CPO.

#### **2.4 Kebijakan Tiongkok terkait Impor CPO**

Dalam konteks perdagangan internasional, keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi dan strategi domestik suatu negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara mitra dagang. Dalam hal ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), Tiongkok—sebagai salah satu importir utama Indonesia—menerapkan serangkaian kebijakan dan regulasi teknis yang perlu dipahami sebagai tantangan eksternal dalam rantai nilai global (*Global Value Chain*). Meskipun hubungan dagang Indonesia–Tiongkok berada dalam kerangka kerja sama *ASEAN–China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang memungkinkan tarif impor relatif rendah atau bahkan bebas bea, nyatanya hambatan non-tarif tetap menjadi kendala utama. Hambatan ini mencakup persyaratan sertifikasi produk, traceability system, serta penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi. Di sisi lain, isu keberlanjutan juga semakin mengemuka, terutama sejak Tiongkok memperkenalkan kebijakan *Green Food Development Policy* yang mendorong impor produk pertanian, termasuk CPO, yang bebas dari deforestasi, terverifikasi keberlanjutan, dan tidak mengancam ketahanan pangan domestik. Persyaratan ini memaksa Indonesia sebagai eksportir utama untuk tidak hanya menjaga volume dan harga, tetapi juga memenuhi ekspektasi transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kebijakan impor Tiongkok sebagai bagian dari dinamika diplomasi ekonomi dan tantangan eksternal dalam mempertahankan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global CPO.

#### 2.4.1 Ketentuan Teknis dan Tarif Impor

Dalam mengimpor *Crude Palm Oil* (CPO), Tiongkok menerapkan sejumlah ketentuan teknis dan tarif yang memainkan peran penting sebagai tantangan eksternal bagi eksportir Indonesia. Secara umum, CPO yang masuk melalui skema *ASEAN–China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan RCEP dikenai tarif preferensial nol persen (Hsu & Tuan, 2001), yang secara signifikan memperkuat akses pasar Indonesia. Namun demikian, produk turunan CPO—seperti RBD palm oil—bukan merupakan bagian dari tarif nol ini, dan masih dikenakan tarif MFN sekitar 9 % untuk minyak nabati serta tambahan hingga 35,75 % untuk refined products tertentu (Gapki, 2018; ITC, 2022). Selain itu, sejak 2018 Tiongkok mulai menerapkan aturan teknis yang lebih ketat terkait label, kontaminan, dan traceability dalam dokumen impor—paraf institusional seperti COFCO International bahkan menerapkan pilot project impor berbasis klausa deforestasi-free (Reuters, 2024). Tiongkok memperkuat regulasi keberlanjutan melalui kebijakan *Green Food Development* dan *China Sustainable Palm Oil Alliance*, yang mengharuskan importir menyediakan bukti sertifikasi RSPO, ISPO, atau jaminan bebas deforestasi (WRI Indonesia, 2023; Efrita, 2021). Introduksi platform digital seperti RSPO prisma dan peningkatan kewajiban *book-and-claim* di China Forum 2024 menegaskan bahwa traceability bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat utama untuk kelanjutan perdagangan (RSPO China, 2024; WRI Indonesia, 2023). Hal ini berarti, meski tarif relatif bersahabat, keberlanjutan dan ketelusuran jejak pasokan kini menjadi determinan utama dalam akses pasar CPO ke Tiongkok.

Dari segi teknis, CPO dan turunannya wajib memenuhi standar mutu pangan (food safety) yang merujuk kepada parameter seperti asam lemak bebas, kontaminan mikrobiologis, pestisida, dan residu berat. Keberadaan sistem *China Customs Declaration* mewajibkan importir menyertakan dokumen lengkap seperti Certificate of Origin, Fumigation, dan Sustainability Certification (ITC, 2022). Impor yang gagal memenuhi spesifikasi teknis ini tidak hanya berisiko ditolak, tetapi juga berpotensi dikembalikan tanpa kompensasi finansial, yang berdampak langsung pada kerugian eksportir dan reputasi.

Selain hambatan tarif dan teknis, Tiongkok semakin memperhatikan aspek ketahanan pangan nasional. Di satu sisi, pemerintah menggalakkan impor bahan baku minyak nabati untuk mendukung program biodiesel dan kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi lain, mereka juga menjaga ketersediaan stok domestik dengan memodulasi impor melalui cadangan strategis dan proteksi non-tarif, seperti kuota stok dan aturan deklarasi stok minimal (USDA, 2023). Perpaduan antara tujuan keberlanjutan, keamanan pangan, dan stabilisasi harga ini menghasilkan landasan kebijakan impor CPO di Tiongkok yang multi-dimensi dan cukup kompleks.

Dengan demikian, meski struktur tarif di bawah ACFTA memberikan keuntungan, tantangan teknis (sertifikasi, traceability), sertifikasi keberlanjutan (RSPO/ISPO/deforestation-free), dan sistem proteksi non-tarif (kadang berupa kuota stok atau persyaratan label pangan) memperlihatkan bahwa pasar Tiongkok mengutamakan kombinasi antara harga, kualitas, dan nilai lingkungan. Bagi Indonesia, ini berarti diplomasi perdagangan harus memperluas fokus dari sekadar

negosiasi tarif ke penguatan kapabilitas sertifikasi, teknologi traceability, dan standardisasi mutu untuk menjaga posisi dalam rangkaian nilai global CPO.

#### 2.4.2 Isu Keberlanjutan (Green Food Policy, Non-Deforestation)

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin menekankan keberlanjutan sebagai prasyarat utama dalam kebijakan impor komoditas pertanian, termasuk Crude Palm Oil (CPO). Kebijakan Green Food Development Policy serta inisiatif seperti China Sustainable Palm Oil Alliance, yang didukung oleh RSPO dan WWF, mendorong importir untuk memprioritaskan produk yang telah terverifikasi bebas deforestasi (RSPO, 2018; RSPO China Forum, 2023). Komitmen ini didorong oleh kesadaran lingkungan global dan tekanan investor melalui regulasi ESG, serta tandatangan Xi Jinping atas target karbon Net Zero pada 2060 (Reuters, 2024; Eco-Business, 2023). Meskipun volume impor CPO bersertifikasi di Tiongkok masih relatif kecil—diperkirakan hanya 2 % dari total impor pada akhir 2023—pertumbuhan minat ini terlihat dari partisipasi 149 pelaku dan 103 sertifikat RSPO yang diterbitkan di China (Eco-Business, 2024; China Daily, 2025). Lebih jauh, Tiongkok secara aktif mempromosikan penggunaan model sertifikasi "*book-and-claim*" di tingkat hilir untuk meningkatkan akses pasar bagi CPO bersertifikat dan menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan (Eco-Business, 2024). Kolaborasi dengan lembaga-lembaga swasta dan BUMN seperti COFCO dan CFNA telah memperkuat adopsi model ini (Reuters, 2024; Eco-Business, 2023). Inisiatif ini dipandang sebagai langkah awal dalam mendorong pembeli domestik dan multinasional untuk mencantumkan

klausul non-deforestasi dalam kontrak impor dan rantai pasokan, sekaligus memenuhi target keberlanjutan global Eropa dan UN.

Semangat non-deforestasi juga menjadi bagian dari tekanan regulasi global seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) dan Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDDD), yang mendorong negara pembeli—tidak terkecuali Tiongkok—untuk memastikan produk impor tidak menyumbang pada kehilangan hutan tropis (Eco-Business, 2023). Kebijakan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi eksportir Indonesia, yang kini diharuskan untuk meningkatkan sertifikasi RSPO/ISPO dan menyediakan data traceability formal (RSPO Forum, 2023; ITC, 2022). Tanpa kepastian transparansi dan keberlanjutan, produk dari Indonesia dapat terdiskualifikasi dari akses pasar atau menghadapi birokrasi tambahan di pelabuhan China. Sementara itu, masyarakat konsumen kelas atas di Tiongkok mulai menyadari dampak lingkungan pola konsumsi pangan mereka. Survei menyebutkan sekitar 85 % warga Tiongkok menyatakan bersedia membayar lebih untuk produk pertanian bersertifikat ramah lingkungan, dibandingkan hanya 36 % di AS (MPOC, 2023). Meskipun adopsi CSPO masih terbatas, peningkatan kesadaran ini memberikan sinyal positif bagi eksportir Indonesia untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi ekspor dan *diplomatic branding* nasional.

#### 2.4.3 Preferensi Perdagangan *ACFTA*

Indonesia dan Tiongkok sebagai dua negara anggota dalam kerangka kemitraan ekonomi regional, Indonesia dan Tiongkok menikmati kemudahan perdagangan yang diatur dalam skema ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA),

yang resmi berlaku sejak tahun 2010. ACFTA memberikan preferensi tarif yang signifikan, termasuk terhadap komoditas Crude Palm Oil (CPO), yang merupakan salah satu ekspor unggulan Indonesia. Dalam skema ini, Tiongkok menurunkan tarif impor CPO Indonesia menjadi 0%, menjadikan produk sawit Indonesia sangat kompetitif dibanding negara lain yang tidak tergabung dalam FTA tersebut (ASEAN Secretariat, 2020; ITC, 2022). Preferensi tarif ini memperkuat posisi Indonesia di pasar Tiongkok, mengingat tingginya konsumsi minyak nabati di negara tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Pada tahun 2023, Indonesia menyumbang lebih dari 40% dari total impor CPO Tiongkok, sebuah capaian yang sebagian besar didukung oleh keberlakuan ACFTA (GAPKI, 2024). Namun demikian, meskipun tarif dasar untuk produk CPO mentah diturunkan hingga nol persen, produk olahan atau refined palm oil seperti RBD palm olein masih menghadapi tarif Most Favoured Nation (MFN) sebesar 9%–30%, tergantung kategori HS Code yang berlaku (UNCTAD, 2023). Ini menjadi perhatian khusus karena produk olahan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi eksportir, namun tidak sepenuhnya mendapatkan insentif dari perjanjian ACFTA. Lebih lanjut, selain tarif, eksportir juga harus memenuhi aturan asal barang atau *Rules of Origin* (RoO) yang ketat untuk memastikan bahwa produk benar-benar berasal dari negara anggota ASEAN agar dapat mengklaim tarif preferensial (ASEAN Secretariat, 2020). Dalam konteks ini, transparansi dokumen, sertifikat asal (Form E), dan kepatuhan administratif menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku industri sawit Indonesia.

Selain itu, ACFTA juga mencakup elemen fasilitasi perdagangan dan penyelesaian sengketa yang memberikan kepercayaan lebih bagi eksportir terhadap kepastian hukum dan prosedur ekspor-impor ke Tiongkok. Perjanjian ini menjadi landasan penting bagi upaya Indonesia untuk tidak hanya menjaga kestabilan perdagangan CPO ke Tiongkok, tetapi juga mendorong perluasan ekspor ke sektor produk turunan seperti oleokimia dan biodiesel. Walaupun demikian, manfaat ACFTA tetap tidak menjamin kelancaran penuh karena eksportir masih dihadapkan pada hambatan non-tarif seperti regulasi lingkungan, persyaratan keberlanjutan, serta kontrol kualitas yang diperketat oleh otoritas Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir (ITC, 2022; WRI Indonesia, 2023). ACFTA memberikan peluang besar bagi perdagangan CPO Indonesia ke Tiongkok melalui penghapusan tarif, namun tantangan tetap ada pada sektor hilir, standar keberlanjutan, dan regulasi non-tarif.

#### 2.4.4 Hambatan Non-tarif

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Tiongkok menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat tarif, melainkan juga hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTBs) yang semakin kompleks. Hambatan non-tarif tersebut meliputi kewajiban sertifikasi keberlanjutan, standar mutu dan keamanan pangan, persyaratan traceability (ketertelusuran), dan pengawasan bea cukai yang ketat terhadap produk-produk pertanian. Salah satu bentuk NTB utama adalah meningkatnya permintaan akan produk sawit yang bersertifikat seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan verifikasi bebas deforestasi yang menjadi prasyarat tak tertulis dalam rantai pasok CPO ke Tiongkok (RSPO China Forum, 2023; WRI Indonesia, 2023).

Selain itu, adanya kewajiban untuk memenuhi dokumen traceability lengkap, termasuk sertifikat asal dan sistem pelacakan digital di bea cukai Tiongkok, telah menambah beban administratif dan logistik bagi eksportir Indonesia (ITC, 2022).

Faktor lain yang memicu penguatan NTB adalah komitmen Tiongkok terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Sejak diluncurkannya kebijakan Green Food Development Plan, produk pertanian yang masuk ke pasar Tiongkok diwajibkan memenuhi standar ramah lingkungan dan bebas kontaminan berbahaya, termasuk dalam produk minyak nabati (WRI Indonesia, 2023). Selain itu, tekanan global terkait isu lingkungan seperti deforestasi, emisi karbon, dan hak tenaga kerja turut mendorong Tiongkok untuk memperketat standar impor dan menghindari reputasi negatif akibat penggunaan komoditas yang tidak berkelanjutan (Eco-Business, 2023). Dalam praktiknya, meskipun tidak secara eksplisit melarang impor CPO dari Indonesia, otoritas Tiongkok mulai memprioritaskan produk yang memiliki jaminan keberlanjutan dan sertifikasi lingkungan untuk mengurangi risiko diplomatik serta tekanan pasar domestik yang mulai menyadari isu-isu keberlanjutan (Efrita, 2021).

Hambatan non-tarif juga datang dari pengawasan teknis terhadap mutu produk, seperti kadar asam lemak bebas, kontaminasi mikrobiologis, residu pestisida, dan bahan kimia yang melebihi ambang batas standar nasional Tiongkok. Produk yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut dapat ditolak di pelabuhan masuk atau dikenakan denda administratif, bahkan dalam kasus tertentu dikembalikan ke negara asal (ITC, 2022). Persyaratan semacam ini membutuhkan kapabilitas teknis dan pengawasan kualitas yang ketat dari pihak eksportir Indonesia agar tidak terjadi

kegagalan masuk pasar. Dalam konteks ini, hambatan non-tarif tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bersifat strategis karena menyangkut diplomasi dagang dan citra Indonesia sebagai produsen sawit global. Dengan demikian, keberadaan NTB dalam perdagangan CPO ke Tiongkok bukan semata bentuk proteksionisme, tetapi juga cerminan dari transformasi pasar global menuju prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia bersama pelaku industri harus mampu merespons hal ini melalui diplomasi ekonomi aktif, harmonisasi standar sertifikasi, dan peningkatan kapasitas sistem traceability yang dapat dipercaya oleh mitra dagang seperti Tiongkok.

## **2.5 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Ekspor CPO**

Dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk memperkuat posisi CPO (Crude Palm Oil) sebagai komoditas ekspor unggulan dalam rantai nilai global (Global Value Chain). Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal seperti bea keluar dan pungutan ekspor, tetapi juga melalui pemberian insentif hilirisasi untuk mendorong pengolahan produk sawit bernilai tambah tinggi (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Selain kebijakan internal, pemerintah juga memanfaatkan jalur diplomasi ekonomi dan promosi perdagangan, khususnya ke negara mitra utama seperti Tiongkok, guna memperluas akses pasar dan menjaga daya saing produk sawit Indonesia di tengah tantangan keberlanjutan, proteksionisme, serta ketatnya regulasi teknis.

Keterlibatan lembaga non-negara seperti GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan penerapan standar ISPO (*Indonesian Sustainable*

*Palm Oil*) menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan industri dalam memenuhi tuntutan pasar global terhadap keberlanjutan dan transparansi rantai pasok (GAPKI, 2023; ISPO, 2022). Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum bilateral maupun multilateral, seperti *WTO* dan *ASEAN-China FTA*, untuk menegosiasikan ketentuan perdagangan, menghindari retaliasi, serta memperjuangkan pengakuan terhadap standar nasional keberlanjutan yang dimiliki Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Subbab ini akan membahas secara terperinci berbagai kebijakan dan strategi tersebut sebagai bentuk respons Indonesia dalam menjaga posisi kompetitifnya dan memaksimalkan peran strategis dalam perdagangan global minyak sawit, khususnya dalam menjawab tantangan ekspor ke pasar Tiongkok.

#### 2.5.1 Kebijakan Ekspor Indonesia

Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan domestik, mendorong nilai tambah industri, serta mengendalikan harga komoditas, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekspor pada industri *Crude Palm Oil* (CPO), termasuk yang ditujukan ke pasar Tiongkok. Dua instrumen utama yang digunakan adalah bea keluar (*export duty*) dan pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Bea keluar diberlakukan secara progresif, menyesuaikan harga referensi CPO dunia, dengan tujuan menjaga kestabilan pasokan dalam negeri serta sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari sektor hulu ke hilir (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Sementara itu, pungutan ekspor digunakan untuk mendanai program hilirisasi, peremajaan sawit rakyat

(PSR), dan subsidi biodiesel, sekaligus sebagai bentuk internalisasi biaya lingkungan dari aktivitas industri sawit (BPDPKS, 2022).

Khusus dalam konteks ekspor ke Tiongkok, kebijakan ini memberi dampak ganda. Di satu sisi, mekanisme bea dan pungutan membuat CPO Indonesia menjadi relatif kurang kompetitif dibanding negara pesaing seperti Malaysia dalam hal harga jual. Namun di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang terintegrasi dengan pungutan ekspor mendorong ekspor produk bernilai tambah seperti RBD (*Refined, Bleached, and Deodorized*) palm olein dan oleokimia, yang memiliki pasar berkembang di Tiongkok terutama di sektor makanan dan bahan baku industri (GAPKI, 2023). Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.05/2022 dan revisi sistem progresif pungutan ekspor, pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku industri yang mengekspor produk hilir, sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor CPO mentah dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain pengaturan fiskal, kebijakan ekspor juga diarahkan untuk mendukung diplomasi perdagangan dan peningkatan kapasitas standar keberlanjutan produk CPO agar dapat memenuhi tuntutan pasar internasional, termasuk dari Tiongkok yang mulai memperketat ketentuan keberlanjutan dan traceability. Dalam hal ini, penguatan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan program traceability berbasis digital menjadi bagian dari kebijakan ekspor yang lebih luas untuk mengamankan akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (WRI Indonesia, 2023). Kebijakan ekspor CPO tidak hanya dilihat sebagai instrumen pendapatan atau proteksi pasar domestik, melainkan

sebagai bagian dari strategi nasional dalam merespons dinamika perdagangan global, khususnya terhadap mitra utama seperti Tiongkok.

#### 2.5.2 Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia semakin mengintensifkan praktik diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama dalam mengamankan kepentingan nasional di sektor perdagangan internasional, termasuk pada komoditas strategis seperti *Crude Palm Oil* (CPO). Diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk menjaga akses pasar, membangun kerja sama dagang yang saling menguntungkan, serta merespons dinamika global seperti isu keberlanjutan, proteksionisme, dan geopolitik dagang. Tiongkok, sebagai mitra dagang utama dan salah satu importir terbesar CPO Indonesia, menjadi fokus penting dalam agenda diplomasi ekonomi. Dalam hubungan bilateral, pemerintah Indonesia secara aktif memanfaatkan forum *Joint Commission on Economic and Trade Cooperation* (JCETC) dengan Tiongkok untuk membahas hambatan teknis, mendorong peningkatan volume ekspor produk hilir CPO, serta mempromosikan skema perdagangan yang menguntungkan bagi kedua negara (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Indonesia juga mendorong pengakuan terhadap sertifikasi nasional ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) di pasar Tiongkok, sebagai bagian dari upaya diplomasi normatif untuk melindungi kepentingan industri sawit dari kampanye negatif dan diskriminasi pasar berbasis standar asing (WRI Indonesia, 2023). Selain dalam forum bilateral, diplomasi ekonomi juga dijalankan melalui pendekatan multilateral seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan *Regional*

*Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) guna memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tarif, ketentuan keberlanjutan, dan regulasi teknis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri secara sinergis melakukan misi dagang dan *business matching*, serta aktif dalam promosi dagang melalui *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di Shanghai dan Beijing yang mempertemukan pelaku industri sawit dengan mitra dagang potensial di Tiongkok (Kementerian Perdagangan RI, 2022). Upaya ini semakin relevan mengingat ketatnya regulasi di Tiongkok terkait keberlanjutan, seperti Green Food Policy dan preferensi terhadap produk bebas deforestasi. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga melibatkan lobi normatif dan reputasional yang bertujuan memperkuat citra Indonesia sebagai eksportir yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Diplomasi ekonomi sektor CPO menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan pendekatan yang adaptif dan multi-level dalam mempertahankan perannya di rantai nilai global, khususnya menghadapi pasar Tiongkok yang semakin menuntut nilai keberlanjutan, kualitas, dan transparansi pasokan.

### 2.5.3 Peran Asosiasi dan Sertifikasi

Dalam mendukung ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke pasar internasional, termasuk ke Tiongkok, peran asosiasi industri dan lembaga sertifikasi nasional menjadi sangat penting dalam membangun kredibilitas, akses pasar, dan pemenuhan standar keberlanjutan global. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berperan sebagai perwakilan industri sawit yang aktif menjembatani kepentingan pengusaha dengan kebijakan pemerintah serta

memfasilitasi hubungan dagang dengan mitra luar negeri melalui kegiatan promosi, forum dagang, dan advokasi perdagangan. GAPKI secara rutin menyampaikan laporan pasar, menyusun rekomendasi kebijakan, serta melakukan komunikasi strategis dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok untuk memastikan stabilitas volume ekspor dan mendorong penguatan produk hilir sawit (GAPKI, 2023). Selain GAPKI, lembaga internasional seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia yang berkelanjutan. Meski RSPO bersifat sukarela dan berbasis pasar, banyak importir dan pelaku industri makanan serta kosmetik di Tiongkok mulai menjadikan sertifikasi ini sebagai prasyarat tidak tertulis dalam kontrak pasokan (RSPO China Forum, 2023).

Sementara itu, dari sisi pemerintah, standar ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) menjadi instrumen strategis dalam memastikan keberlanjutan produksi sawit dalam negeri, sekaligus sebagai alat diplomasi normatif untuk menyeimbangkan dominasi standar asing. ISPO yang bersifat wajib sejak 2020 tidak hanya menetapkan prinsip keberlanjutan lingkungan, tetapi juga aspek legalitas lahan, kesejahteraan petani, dan pelacakan rantai pasok. Dalam konteks hubungan dagang dengan Tiongkok, penguatan penerapan ISPO menjadi kunci untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdagangan berkelanjutan dan menjadi bahan negosiasi dalam forum bilateral, termasuk untuk mendorong pengakuan internasional terhadap sertifikasi ini (ISPO, 2022; Efrita, 2021). Peran ini tidak bisa dilepaskan dari koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit (BPDPKS), yang secara sinergis terlibat dalam peningkatan kapasitas petani, promosi dagang, dan pendanaan peremajaan sawit rakyat sebagai bentuk jaminan keberlanjutan sistemik. Kolaborasi antara aktor negara dan non-negara ini menjadi fondasi penting dalam merespons tantangan perdagangan global yang kini tidak hanya menyoal tarif, tetapi juga menyangkut legitimasi produk, standar keberlanjutan, dan persepsi pasar. Dalam lanskap perdagangan CPO dengan Tiongkok, peran aktif GAPKI dalam diplomasi bisnis, RSPO dalam pembentukan nilai tambah reputasional, serta ISPO sebagai payung legal keberlanjutan nasional merupakan kombinasi strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

#### 2.5.4 Isu Retaliasi dan Forum Bilateral & Multilateral

Dalam sistem perdagangan global, isu retaliasi atau pembalasan dagang menjadi salah satu tantangan utama yang harus diantisipasi pemerintah Indonesia, terutama dalam konteks ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang kerap menjadi sorotan internasional terkait isu lingkungan, deforestasi, dan keberlanjutan. Retaliasi dapat muncul dalam bentuk pengetatan regulasi teknis, penolakan produk di pelabuhan, hingga penundaan prosedur bea masuk oleh negara mitra dagang, termasuk Tiongkok. Meskipun Tiongkok selama ini menjadi pasar strategis dan relatif stabil bagi CPO Indonesia, tekanan global dari negara-negara barat terkait standar keberlanjutan dapat mendorong Tiongkok untuk ikut memberlakukan pembatasan tidak langsung terhadap produk CPO yang tidak memenuhi prinsip non-deforestasi dan traceability (Efrita, 2021; WRI Indonesia, 2023).

Merespons potensi retaliasi tersebut, pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi perdagangan di forum bilateral dan multilateral, termasuk melalui *ASEAN–China Free Trade Agreement* (ACFTA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam forum bilateral, Indonesia menggunakan wadah seperti *Joint Commission on Economic and Trade Cooperation* (JCETC) dengan Tiongkok untuk menyampaikan posisi nasional terhadap praktik perdagangan yang adil, pengakuan terhadap standar nasional seperti ISPO, serta perlunya kerja sama dalam mengatasi hambatan teknis yang tidak berdasar (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Sementara di forum multilateral seperti WTO, Indonesia terus mengadvokasi prinsip *non-discrimination* dan *special and differential treatment* bagi negara berkembang agar memiliki ruang kebijakan untuk melindungi industri domestik strategis seperti kelapa sawit (OECD, 2022). Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara produsen sawit lain seperti Malaysia melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) guna menyuarakan kepentingan bersama dan menghadapi tekanan regulasi yang dianggap diskriminatif, seperti regulasi EUDR dari Uni Eropa. Dalam kaitannya dengan Tiongkok, kerja sama ini memperkuat posisi tawar Indonesia untuk memastikan bahwa negara mitra tidak serta-merta mengikuti langkah proteksionis atau standar yang menghambat akses produk sawit dari Indonesia. Oleh karena itu, diplomasi dagang Indonesia dalam konteks retaliasi tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif dalam membentuk norma perdagangan yang lebih adil dan inklusif di tingkat global.

## **2.6 Posisi Indonesia dalam Global Value Chain Komoditas CPO**

Industri *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia memiliki peran krusial sebagai salah satu pemasok utama minyak nabati dunia. Namun, kontribusi tersebut sebagian besar masih bertumpu pada ekspor bahan mentah dan produk setengah jadi, menempatkan Indonesia di posisi hulu dalam struktur *Global Value Chain* (GVC). GVC adalah konsep yang menjelaskan bagaimana produksi barang dan jasa terfragmentasi secara internasional, dengan pembagian kerja global yang menempatkan negara pada peran tertentu berdasarkan kapasitas industri, nilai tambah, dan teknologi (Gereffi, 2018). Dalam rantai nilai ini, posisi Indonesia sering kali berada pada tahapan produksi awal (upstream), seperti budidaya, ekstraksi CPO, dan ekspor bahan mentah, sementara nilai tambah dan kendali atas pasar global lebih banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional dan buyer asing di hilir rantai pasok (Pietrobelli & Rabellotti, 2006).

Situasi ini memunculkan tantangan struktural sekaligus peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan upgrading, yaitu pergeseran ke posisi lebih tinggi dalam GVC melalui hilirisasi industri, peningkatan standar keberlanjutan, serta penguatan brand dan daya saing produk olahan. Pembahasan dalam subbab ini akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana posisi Indonesia dalam GVC komoditas sawit terbentuk, peran aktor-aktor asing dan domestik dalam mengatur alur nilai, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pemain global yang lebih mandiri dan berdaya saing. Pembahasan ini akan menjadi landasan teoritis dan transisi menuju Bab 3 yang akan

menganalisis dinamika perdagangan CPO ke Tiongkok melalui pendekatan teori global value chain dan diplomasi ekonomi.

#### 2.6.1 Indonesia sebagai Penyedia Bahan Mentah

Indonesia saat ini menempati posisi dominan sebagai salah satu produsen dan eksportir utama *Crude Palm Oil* (CPO) di dunia. Namun, dalam struktur *Global Value Chain* (GVC) komoditas CPO, posisi Indonesia secara umum masih terfokus pada tahap produksi hulu, yaitu pengolahan bahan mentah (raw materials) seperti CPO dan PKO (*Palm Kernel Oil*), serta ekspor dalam bentuk produk setengah jadi. Indonesia menguasai sekitar 58% produksi CPO global pada tahun 2022 (USDA, 2023), namun mayoritas produk yang diekspor adalah dalam bentuk komoditas mentah dan produk turunan primer seperti RBD palm olein, bukan dalam bentuk produk akhir bernilai tambah tinggi seperti oleokimia khusus, produk makanan jadi, kosmetik, atau bioenergi berteknologi lanjut. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah ini menempatkan Indonesia di posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga global, ketentuan pasar negara tujuan, serta tekanan dari aktor hilir seperti perusahaan multinasional dan importir besar.

Dalam kajian GVC oleh Gereffi (2018), posisi suatu negara dalam rantai nilai global sangat bergantung pada kemampuan penguasaan teknologi, kontrol desain, dan akses pasar akhir. Sayangnya, dalam konteks industri sawit, aktivitas bernilai tambah tinggi seperti formulasi produk konsumen, *branding*, dan distribusi global masih didominasi oleh perusahaan asing seperti Unilever, Nestlé, atau Wilmar International yang berbasis di Singapura. Bahkan, beberapa industri hilir Indonesia bergantung pada investasi dan teknologi dari korporasi global untuk

memproduksi produk olahan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak berperan sebagai supplier bahan baku (input supplier) dalam GVC CPO, sementara posisi pemilik teknologi dan pengendali pasar masih dipegang oleh aktor asing yang berperan sebagai lead firms dalam rantai nilai global (Pietrobelli & Rabellotti, 2006).

Meskipun pemerintah telah mendorong hilirisasi dan insentif produksi biodiesel melalui program mandatori B35, struktur ekspor Indonesia tetap menunjukkan dominasi produk primer. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 70% volume ekspor sawit Indonesia masih berupa CPO dan RBD Palm Olein, sementara ekspor produk hilir seperti margarin, sabun, dan kosmetik berbasis sawit masih terbatas. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi industri hilir, kurangnya inovasi produk, serta lemahnya akses ke pasar konsumen global menjadi tantangan utama dalam upaya upgrading posisi Indonesia dalam GVC. Oleh karena itu, strategi untuk mendorong transisi dari penyedia bahan mentah menjadi pemilik rantai nilai memerlukan intervensi jangka panjang dalam bentuk investasi R&D, *transfer* teknologi, serta diplomasi industri untuk memperkuat posisi tawar terhadap negara-negara pengimpor seperti Tiongkok.

#### 2.6.2 Peran Perusahaan Multinasional dan *Buyer* Asing

Dalam struktur *Global Value Chain* (GVC) industri sawit, perusahaan multinasional (*multinational corporations*/MNCs) dan buyer asing memegang peranan sentral dalam menentukan arus nilai, standar keberlanjutan, dan struktur pasar global. Meski Indonesia adalah produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO), kontrol atas proses hilir—yang mencakup penyulingan tingkat lanjut, manufaktur

produk konsumen, distribusi, serta *branding*—masih didominasi oleh perusahaan global seperti Wilmar International, Cargill, Unilever, Nestlé, dan Procter & Gamble. Perusahaan-perusahaan ini berperan sebagai lead firms dalam GVC CPO, yang memiliki pengaruh besar terhadap harga, spesifikasi teknis, sertifikasi lingkungan, dan sistem logistik perdagangan sawit global (Gereffi, 2018).

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga aktor integratif yang mengendalikan proses dari hulu hingga hilir, sering kali melalui skema kontrak, akuisisi aset perkebunan, hingga investasi pada fasilitas penyulingan di Indonesia. Sebagai contoh, Wilmar—yang meskipun terdaftar di Singapura—menguasai lebih dari 20 fasilitas penyulingan dan pabrik pengolahan sawit di Indonesia dan berperan sebagai eksportir sekaligus pemroses produk hilir (Pacheco et al., 2020). Sementara itu, Unilever dan Nestlé lebih fokus sebagai buyer akhir yang menetapkan standar keberlanjutan tinggi seperti RSPO, NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), dan traceability, sehingga secara tidak langsung memaksa produsen Indonesia untuk menyesuaikan praktik produksi agar tetap terintegrasi dalam rantai pasok mereka. Peran buyer asing yang dominan ini membuat produsen sawit Indonesia berada dalam posisi tawar yang terbatas, terutama dalam penetapan harga dan pemenuhan regulasi keberlanjutan. Buyer asing juga memegang kendali atas akses ke pasar internasional, karena konsumen akhir lebih mengenal merek global dibandingkan merek lokal Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep *governance* dalam GVC, di mana relasi antara negara produsen seperti Indonesia dengan perusahaan multinasional bersifat *buyer-driven*,

yaitu nilai tambah dan kendali pasar berada di tangan pembeli atau pemilik merek (Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005).

Meskipun keterlibatan perusahaan multinasional membuka peluang transfer teknologi dan investasi asing langsung, keberadaan mereka juga memperkuat ketimpangan posisi dalam rantai nilai. Dalam banyak kasus, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh perusahaan global yang berada di segmen hilir, sementara petani dan produsen hulu di Indonesia menerima porsi paling kecil dari total nilai produk. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan posisi tawarnya dalam GVC, diperlukan strategi yang lebih proaktif dalam menegosiasikan skema perdagangan, memperkuat standar nasional seperti ISPO, serta membangun merek dan kapasitas distribusi global sendiri agar tidak terus berada dalam ketergantungan terhadap *lead firms* asing.

#### 2.6.3 Potensi dan Tantangan *Upgrading* Posisi Indonesia di GVC

Upaya *upgrading* posisi Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC) industri *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah nasional, memperkuat posisi tawar di pasar internasional, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. *Upgrading* dalam GVC mencakup beberapa dimensi, yakni product upgrading (pengolahan produk ke bentuk bernilai lebih tinggi), process upgrading (efisiensi produksi), functional upgrading (penguasaan fungsi strategis seperti R&D dan branding), serta inter-sectoral upgrading (diversifikasi ke sektor lain seperti bioenergi dan farmasi) (Pietrobelli & Rabellotti, 2006). Dalam konteks Indonesia, potensi *upgrading* ini cukup besar mengingat posisi sebagai produsen terbesar CPO global, ketersediaan

bahan baku melimpah, dan dukungan kebijakan hilirisasi nasional seperti mandatori biodiesel B35 serta insentif fiskal untuk industri pengolahan (Kementerian Perindustrian RI, 2023). Namun, proses *upgrading* Indonesia dalam GVC CPO juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah penguasaan teknologi dan infrastruktur industri hilir yang masih terbatas. Banyak industri pengolahan produk akhir seperti kosmetik, bahan pangan olahan, dan oleokimia canggih masih dikuasai oleh perusahaan asing, baik dari sisi teknologi, jaringan distribusi global, maupun pengakuan merek (Gereffi, 2018). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia terampil, lemahnya ekosistem riset dan inovasi, serta belum optimalnya integrasi antar sektor industri juga menjadi penghambat dalam pencapaian *upgrading* yang berkelanjutan (Pacheco et al., 2020). Secara normatif, upaya Indonesia untuk memperkuat standar keberlanjutan melalui ISPO masih menghadapi tantangan pengakuan internasional, terutama dibandingkan RSPO yang lebih diadopsi oleh pasar luar negeri.

Dari sisi pasar, peluang untuk *upgrading* juga terbuka melalui diversifikasi tujuan ekspor dan penetrasi pasar niche seperti produk organik, produk bebas deforestasi, dan bahan baku bioenergi ramah lingkungan. Tiongkok sebagai mitra dagang utama menjadi pangsa pasar strategis yang dapat dimanfaatkan untuk produk hilir seperti refined olein, fatty acid, dan biodiesel, mengingat meningkatnya permintaan mereka di sektor energi dan manufaktur (Efrita, 2021). Namun, hal ini juga menuntut kepatuhan terhadap standar teknis, *traceability*, dan keberlanjutan, yang jika tidak dipenuhi justru dapat mempersempit ruang ekspor dan memunculkan hambatan non-tarif. Indonesia dalam melakukan *upgrading* posisi

dalam GVC CPO memerlukan pendekatan yang holistik—mulai dari perbaikan kebijakan industri, insentif riset dan inovasi, penguatan kelembagaan sertifikasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga diplomasi ekonomi yang aktif untuk memperjuangkan pengakuan terhadap standar nasional di forum internasional. Upgrading bukan hanya agenda industri, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa keunggulan komparatif Indonesia sebagai penghasil sawit dunia dapat berubah menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang di pasar global.